

URGENSI INTEGRASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA ESG

Amrie Firmansyah

amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Sustainability issues have become a mainstream agenda in global governance, driven by increasing pressure on corporations and public institutions to integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into corporate reporting. The issuance of IFRS S1 and S2 by the International Sustainability Standards Board (ISSB), along with national policies such as Indonesia's Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51 of 2017 and the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045, underscores the importance of sustainability as a component of corporate accountability and national development. This creates an urgency for accounting higher education to produce graduates who are proficient in conventional accounting and competent in sustainability reporting. This study adopts a scoping review approach to map the substance, urgency, and strategies for integrating sustainability accounting into the accounting curriculum in Indonesia. The analysis draws on 27 documents, including academic articles, national regulations, and international reporting standards. All documents were selected and analyzed narratively using a thematic approach to identify trends, challenges, and opportunities for ESG integration in accounting education. The findings indicate that a systemic transformation is required, including curriculum revision, capacity building for lecturers, development of ESG-based learning modules, and strengthened collaboration with the industry sector. Professional bodies such as the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Accounting Education Compartment (IAI KAPd) are expected to formulate ESG-based learning outcomes and competency standards strategically. This study contributes to the accounting education literature and provides policy recommendations for curriculum enhancement in the sustainability era.

Keywords: Accounting Higher Education, Curriculum, ESG, Scoping Review. Sustainability Accounting

Abstrak

Isu keberlanjutan telah menjadi arus utama dalam tata kelola global, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan dan institusi publik untuk mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pelaporan perusahaan. Penerbitan IFRS S1 dan S2 oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), serta kebijakan nasional seperti POJK No. 51 Tahun 2017 dan RPJPN 2025–2045, menegaskan pentingnya keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas korporasi dan pembangunan nasional. Hal ini menciptakan urgensi bagi pendidikan tinggi akuntansi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya mahir dalam akuntansi konvensional, tetapi juga kompeten dalam pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk memetakan substansi, urgensi, dan strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap 27 dokumen yang terdiri dari artikel akademik, regulasi nasional, dan standar internasional. Seluruh dokumen diseleksi dan dianalisis secara naratif menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang integrasi ESG dalam pendidikan tinggi akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi sistemik diperlukan, mencakup revisi kurikulum, peningkatan kapasitas dosen, penyusunan modul berbasis ESG, serta penguatan kolaborasi dengan sektor industri. Organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kompartemen Akuntansi Pendidikan (IAI KAPd) diharapkan memainkan peran strategis dalam merumuskan standar kompetensi dan capaian pembelajaran berbasis ESG. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan akuntansi dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan kurikulum di era keberlanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Keberlanjutan, ESG, Kurikulum, Pendidikan Tinggi Akuntansi, *Scoping Review*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, krisis energi, serta ketimpangan sosial yang semakin meluas telah mendorong transformasi paradigma pembangunan dan pelaporan korporasi di tingkat global (Gutterman, 2024). Dalam konteks tersebut, isu keberlanjutan tidak lagi menjadi wacana normatif, melainkan telah menjadi elemen sentral dalam tata kelola organisasi, termasuk di bidang akuntansi. Transformasi signifikan ini tercermin dalam penerbitan IFRS S1 dan IFRS S2 oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB)



pada tahun 2023, yang memperkenalkan kerangka standar pelaporan keberlanjutan berbasis materialitas finansial dan risiko iklim. Kedua standar tersebut tidak hanya menuntut pengungkapan informasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*), tetapi juga secara langsung menempatkan profesi akuntan sebagai aktor strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tata kelola yang bertanggung jawab (Gutterman, 2024).

Di Indonesia, semangat global ini direspons melalui terbitnya POJK No. 51 Tahun 2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan setiap tahun (Peraturan OJK, 2017). Dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang, RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai salah satu pilar utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 (Undang-Undang RI, 2024). Regulasi tersebut mengimplikasikan bahwa pendidikan tinggi diberi mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran dan keterampilan dalam menjawab tantangan keberlanjutan secara multidimensi.

Namun, terdapat indikasi kuat bahwa sistem pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan transformasi ini. Kurikulum program studi akuntansi di berbagai perguruan tinggi masih cenderung berorientasi pada pendekatan konvensional, seperti akuntansi keuangan, audit, dan perpajakan, tanpa menyentuh secara substansial aspek keberlanjutan seperti pelaporan ESG, pengukuran dampak lingkungan dan sosial, atau penguatan akuntabilitas lintas pemangku kepentingan (Firmansyah et al., 2025). Kesenjangan ini menyebabkan adanya celah yang lebar antara kompetensi lulusan dan tuntutan dunia profesi, terutama di tengah meningkatnya regulasi dan ekspektasi terhadap pelaporan keberlanjutan.

Permasalahan utamanya terletak pada belum optimalnya kesiapan kurikulum dan kapasitas tenaga pendidik dalam mengintegrasikan topik keberlanjutan sebagai bagian yang menyatu dalam proses pembelajaran akuntansi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan lulusan akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun maupun mengevaluasi informasi keberlanjutan secara kredibel dan sesuai dengan standar global. Padahal, lulusan program studi akuntansi merupakan calon profesional yang akan berperan sebagai penyusun, penyaji, bahkan pengaudit informasi keberlanjutan, sebuah peran strategis di tengah meningkatnya tuntutan pelaporan ESG.

Di sisi lain, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 telah membuka ruang inovasi dan fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan program studi merancang capaian pembelajaran sesuai kebutuhan zaman, termasuk penguatan aspek keberlanjutan, berpikir kritis, dan kolaborasi lintas sektor (Permendikbudristek, 2023). Namun, tanpa adanya kerangka pengembangan kurikulum nasional yang secara eksplisit mengatur integrasi akuntansi keberlanjutan, implementasinya di tingkat institusi pendidikan cenderung bersifat sporadis, belum terstandar, dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kompetensi antar lulusan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan, baik secara konseptual maupun implementatif, antara arah kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kesiapan pendidikan tinggi akuntansi dalam mengadopsi prinsip keberlanjutan ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, topik ini perlu diulas lebih mendalam guna menghasilkan pemetaan sistematis terkait substansi, urgensi, dan strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia..

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek akuntansi keberlanjutan, tetapi umumnya berfokus pada praktik pelaporan di perusahaan (Ozili, 2021; Yan, 2024), adopsi standar (Doloksaribu & Firmansyah, 2024), atau kebijakan keberlanjutan secara makro (Badruzzuhad et al., 2023). Sebagian studi di luar negeri mulai mengkaji integrasi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan akuntansi (Egan & Tweedie, 2018; Gebreiter, 2022; Wong et al., 2016), namun belum banyak penelitian serupa dilakukan di Indonesia. Dalam konteks

Indonesia, Lhutfi & Mardiani (2020) dan Oktavianto et al. (2023) menegaskan bahwa integrasi isu keberlanjutan dalam pendidikan akuntansi masih minim dan cenderung tidak merata di berbagai institusi. Dengan demikian, terdapat celah penelitian mengenai bagaimana strategi dan urgensi pengarusutamaan akuntansi keberlanjutan dalam pendidikan tinggi akuntansi Indonesia dapat dirumuskan secara sistematis.

Berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi substansi, urgensi, dan strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena secara khusus menelaah kesiapan dan arah pengembangan kurikulum, bukan hanya pada aspek adopsi pelaporan keberlanjutan di entitas bisnis.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada dua dimensi. Pertama, secara akademik, penelitian ini memperluas literatur pendidikan akuntansi dengan memberikan pemetaan sistematis tentang tantangan dan peluang integrasi akuntansi keberlanjutan dalam konteks kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya Kompartemen Akuntansi Pendidikan (IAI KAPd), dalam menyusun arah kebijakan kurikulum nasional yang sejalan dengan perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan global dan kebutuhan pembangunan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan dan Teori Legitimasi

Kerangka teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada dua perspektif utama: teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terkena dampak dari aktivitasnya (Freeman, 1984; Freeman et al., 2021). Dalam konteks pendidikan tinggi, institusi seperti program studi akuntansi harus mempertimbangkan kepentingan mahasiswa, regulator, industri, asosiasi profesi, dan masyarakat luas dalam merancang kurikulum. Keberadaan isu keberlanjutan, terutama yang berkaitan dengan pelaporan ESG, menjadi bagian dari tuntutan pemangku kepentingan terhadap kualitas dan relevansi lulusan akuntansi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan topik-topik keberlanjutan tidak hanya menjadi bentuk respons akademik, tetapi juga refleksi dari akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan.

Selanjutnya, teori legitimasi digunakan untuk memahami bagaimana institusi pendidikan mempertahankan eksistensinya dalam sistem sosial yang terus berubah. Menurut Suchman (1995), legitimasi adalah hasil konstruksi sosial, yang diperoleh ketika suatu entitas dinilai bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat. Ketika pengguna lulusan baik di sektor korporasi maupun di sektor publik, semakin menuntut lulusan yang paham keberlanjutan, institusi pendidikan yang tidak mampu mengadopsi isu ini dalam kurikulumnya berisiko dianggap tidak relevan. Deegan (2014) menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan adalah bentuk komunikasi organisasi untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi sosial. Oleh karena itu, integrasi akuntansi keberlanjutan dalam pendidikan tinggi bukan sekadar pilihan inovatif, melainkan mekanisme untuk mempertahankan kepercayaan publik dan daya saing institusi.

Dengan demikian, teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi saling memperkuat dalam menjelaskan mengapa institusi pendidikan tinggi akuntansi perlu mengarusutamakan akuntansi keberlanjutan dalam kurikulumnya. Keduanya menekankan bahwa transformasi kurikulum bukan hanya tentang merespons perubahan standar teknis, tetapi juga bagian dari strategi kelembagaan untuk menjawab tuntutan sosial, meningkatkan legitimasi, dan memenuhi

ekspektasi multi-stakeholder terhadap lulusan akuntansi yang kompeten, etis, dan sadar akan tantangan global di era ESG.

Perkembangan Global dan Nasional Akuntansi Keberlanjutan

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan di tingkat global menunjukkan transformasi signifikan dalam praktik akuntansi kontemporer. Peluncuran IFRS S1 dan IFRS S2 oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan pelaporan keuangan konvensional. Kedua standar tersebut mengedepankan prinsip financial materiality dan fokus pada risiko serta peluang terkait iklim. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar pelaporan sukarela menuju pendekatan berbasis regulasi dan tanggung jawab akuntabilitas yang lebih kuat (Gutterman, 2024).

Selain IFRS, kerangka pelaporan lain seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) Standards, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) juga terus digunakan secara luas di berbagai yurisdiksi. Kerangka-kerangka ini menjadi referensi penting bagi perusahaan dalam mengungkapkan strategi keberlanjutan, dampak operasional terhadap lingkungan, serta pendekatan tata kelola ESG. Adopsi kerangka ini secara global menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan, bukan lagi pilihan tambahan.

Di tingkat nasional, Indonesia turut menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui regulasi POJK No. 51 Tahun 2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan (Peraturan OJK, 2017). Komitmen ini diperkuat dalam dokumen RPJPN 2025–2045 yang disahkan melalui UU No. 59 Tahun 2024, serta Perpres No. 12 Tahun 2025 yang secara eksplisit menekankan penguatan kualitas SDM, transisi menuju ekonomi hijau, dan pelibatan sektor pendidikan sebagai mitra strategis pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden RI, 2025; Undang-Undang RI, 2024). Pengaturan ini mengimplikasikan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya berkembang sebagai praktik profesional, tetapi juga telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional jangka panjang.

Akuntansi Keberlanjutan dalam Pendidikan Tinggi Akuntansi

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam aspek regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan, pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap transformasi tersebut. Mayoritas program studi akuntansi masih mempertahankan struktur kurikulum tradisional yang berfokus pada akuntansi keuangan, perpajakan, dan audit, sementara isu-isu penting seperti pelaporan ESG, pengukuran dampak sosial dan lingkungan, serta pengendalian risiko keberlanjutan belum terintegrasi secara sistemik (Firmansyah et al., 2025).

Padahal, kebijakan nasional melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 telah memberikan fleksibilitas penuh kepada perguruan tinggi untuk merancang kurikulum yang adaptif dan relevan terhadap kebutuhan zaman (Permendikbudristek, 2023). Permendikbudristek tersebut mewajibkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup penguasaan isu-isu aktual, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan kolaboratif lintas disiplin (Permendikbudristek, 2023). Namun, tanpa kerangka kurikulum nasional yang mengarahkan integrasi akuntansi keberlanjutan secara eksplisit, maka adopsinya cenderung bersifat inisiatif institusional yang belum merata.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah perlunya peningkatan kapasitas dosen dalam memahami dan mengajarkan topik keberlanjutan secara komprehensif. Saat ini, sebagian besar tenaga pengajar belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan atau sertifikasi di bidang pelaporan keberlanjutan, seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS) atau *Certified Sustainability Reporting Assurer* (CSRA). Konsekuensinya, meskipun upaya

integrasi topik keberlanjutan telah dimulai di sejumlah institusi, implementasinya masih bersifat awal dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi kompetensi teknis maupun filosofis yang dibutuhkan dalam praktik akuntansi di era ESG.

Kebutuhan Kompetensi Akuntan Masa Depan di Era ESG

Tuntutan profesi akuntansi di era keberlanjutan mengalami pergeseran signifikan. Akuntan tidak hanya dituntut untuk mencatat dan menyusun laporan keuangan konvensional, tetapi juga harus memahami dan mampu menyampaikan informasi non-keuangan yang mencakup risiko ESG, strategi keberlanjutan perusahaan, serta dampaknya terhadap nilai jangka panjang. Menurut Ozili (2021), akuntansi keberlanjutan mengharuskan adanya kompetensi lintas-disiplin yang mencakup dimensi teknis, sosial, dan etika, kompetensi yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan pembelajaran tradisional semata.

Firmansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa kesiapan pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, di antaranya adalah kurangnya dosen yang kompeten, keterbatasan akses terhadap praktik terbaik industri, serta belum adanya konektivitas yang kuat antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Hal ini menghambat proses transformasi kurikulum ke arah yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjawab tantangan ESG.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dibutuhkan peran aktif organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya melalui Kompartemen Akuntansi Pendidikan (IAI KAPd) dalam merumuskan kurikulum nasional yang relevan dengan keberlanjutan. Selain itu, kolaborasi antara dunia industri, lembaga sertifikasi, dan institusi pendidikan tinggi juga menjadi kunci dalam menyiapkan lulusan akuntansi yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga tanggap terhadap dinamika global, sensitif terhadap isu keberlanjutan, dan mampu berkontribusi dalam tata kelola yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* untuk memetakan substansi, urgensi, serta strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat topik yang bersifat multidimensi, dinamis, dan relatif baru dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya di Indonesia. Seperti disampaikan dalam bagian pendahuluan dan kajian literatur, meskipun keberlanjutan telah menjadi perhatian utama dalam standar pelaporan global dan kebijakan pembangunan nasional, integrasinya dalam pendidikan tinggi akuntansi masih terbatas dan belum banyak ditelaah secara sistematis. Oleh karena itu, *scoping review* dinilai tepat untuk mengeksplorasi dan memetakan secara menyeluruh literatur dan dokumen kebijakan yang relevan, tanpa membatasi jenis atau desain penelitian yang digunakan.

Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model lima tahap *scoping review* yang dikembangkan oleh Arksey & O'Malley (2005) dan disempurnakan oleh Pham et al. (2014). Lima tahap tersebut meliputi: (1) identifikasi pertanyaan penelitian; (2) penelusuran sumber yang relevan; (3) seleksi studi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi; (4) sintesis hasil secara naratif; dan (5) pelaporan temuan berdasarkan tema utama yang muncul. Pendekatan ini selaras dengan tujuan eksploratif penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana akuntansi keberlanjutan dapat dan perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan akuntansi berdasarkan dinamika kebijakan nasional, praktik internasional, serta tuntutan pemangku kepentingan pendidikan.

Tahap pertama dilakukan dengan merumuskan pertanyaan penelitian secara eksploratif: "Bagaimana urgensi, substansi, dan strategi integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum program studi akuntansi di Indonesia menurut literatur akademik, kebijakan nasional, dan praktik internasional?" Tahap kedua melibatkan penelusuran literatur dari berbagai sumber: artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan nasional (seperti UU No. 59 Tahun 2024, Perpres No.

12 Tahun 2025, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, POJK 51/2017), standar internasional (GRI, IFRS S1 dan S2), dan referensi penunjang lainnya. Rentang waktu literatur yang dianalisis adalah dari tahun 2016 hingga 2024, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, menggunakan kata kunci seperti profesi akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting profession*), pendidikan akuntansi keberlanjutan (*sustainability accounting education*), dan implementasi pelaporan keberlanjutan.

Tahap ketiga adalah proses seleksi literatur. Kriteria inklusi mencakup dokumen yang secara eksplisit membahas pengintegrasian akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum akuntansi atau pendidikan tinggi secara umum, baik dari sisi konseptual, kebijakan, maupun praktik pendidikan. Literatur yang hanya berfokus pada pelaporan keberlanjutan di sektor korporasi tanpa relevansi pendidikan dikeluarkan dari analisis. Seleksi dilakukan secara manual dengan membaca abstrak dan isi utama secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian isi dengan fokus penelitian ini.

Tahap keempat dan kelima dilakukan secara terpadu dalam bentuk sintesis dan pelaporan hasil. Sebanyak 27 referensi/dokumen dipilih untuk dianalisis lebih lanjut yang ditemukan melalui Google Scholar, Scopus, dan situs resmi pemerintah. Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, tahun publikasi, dan keterkaitan dengan integrasi akuntansi keberlanjutan dalam pendidikan tinggi. Jenis dokumen yang dianalisis terdiri dari artikel jurnal ilmiah, regulasi nasional dan standar internasional (seperti IFRS dan GRI). Proses seleksi mengikuti pendekatan manual berbasis abstrak dan isi utama dokumen, tanpa menggunakan charting formal. Beberapa tema utama yang dianalisis mencakup arah kebijakan pembangunan SDM berkelanjutan, tantangan implementasi kurikulum ESG di program studi akuntansi, serta praktik integrasi akuntansi keberlanjutan di negara lain. Berbeda dengan pendekatan sistematis berbasis meta-analisis, penelitian ini tidak menggunakan teknik charting atau pemetaan visual formal, tetapi menyajikan hasil secara deskriptif dan interpretatif agar tetap sejalan dengan karakter eksploratif dari *scoping review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tekanan Regulasi Global dan Nasional sebagai Pendorong Transformasi Kurikulum

Perkembangan regulasi global menunjukkan adanya pergeseran paradigma pelaporan keuangan ke arah pelaporan yang mencakup aspek keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2: Climate-related Disclosures oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) pada tahun 2023 (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Kedua standar ini menetapkan prinsip financial materiality dan fokus pada pengungkapan risiko serta peluang terkait iklim, yang harus dijelaskan secara sistematis oleh entitas dalam laporan mereka (IFRS Foundation, 2023a, 2023b). Standar ini juga mendorong integrasi antara informasi keberlanjutan dan laporan keuangan umum, sehingga profesi akuntansi dituntut untuk tidak hanya menguasai prinsip akuntansi konvensional, tetapi juga memiliki kompetensi dalam memahami, mengukur, dan menyampaikan informasi non-keuangan secara transparan dan relevan (Gutterman, 2024).

Selain IFRS Sustainability Disclosure Standards yang menekankan prinsip materialitas keuangan, *Global Reporting Initiative* (GRI) Standards tetap menjadi salah satu kerangka pelaporan keberlanjutan yang paling banyak diadopsi secara global. GRI mendorong pengungkapan berbasis materialitas ganda, yaitu dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor keberlanjutan memengaruhi kinerja organisasi. Dengan pendekatan yang lebih luas terhadap akuntabilitas sosial dan lingkungan, GRI menyediakan panduan teknis dan indikator yang spesifik untuk berbagai sektor, sehingga pelaporan keberlanjutan menjadi lebih terukur dan dapat dibandingkan lintas entitas dan negara

(Global Report Initiative, 2024). Kerangka ini sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran akuntansi keberlanjutan, terutama untuk melatih mahasiswa dalam memahami tanggung jawab sosial korporasi secara holistik.

Sebagai respons terhadap perkembangan global tersebut, Indonesia telah mengimplementasikan regulasi yang mendukung pelaporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan tahunan (Peraturan OJK, 2017). Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan pelaporan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan bagi pemangku kepentingan, serta penggunaan kerangka pelaporan seperti Global Reporting Initiative (GRI) untuk menjamin keterbandingan dan transparansi informasi (Peraturan OJK, 2017). Dengan adanya regulasi ini, akuntan sebagai penyusun dan penyaji laporan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa informasi keberlanjutan disajikan secara akuntabel dan sesuai standar.

Di tingkat nasional, urgensi penguatan SDM unggul yang berwawasan keberlanjutan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 (Undang-Undang RI, 2024). Dalam perundangan tersebut, keberlanjutan menjadi salah satu prinsip pembangunan jangka panjang, dengan penekanan pada pengembangan SDM yang mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim, revolusi industri, dan ketimpangan sosial (Undang-Undang RI, 2024). Hal ini diperkuat oleh Perpres No. 12 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengamanatkan peningkatan kapasitas pendidikan tinggi untuk mendukung pembangunan rendah karbon, transisi energi, dan integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam semua jenjang pendidikan (Peraturan Presiden RI, 2025).

Berdasarkan kerangka regulatif ini, dapat disimpulkan bahwa institusi pendidikan tinggi, khususnya program studi akuntansi, memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi keberlanjutan dan mampu merespons kebutuhan industri terhadap pelaporan ESG. Apabila institusi pendidikan tidak segera menyesuaikan struktur kurikulumnya, maka akan timbul ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan nyata dunia profesi. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada menurunnya persepsi kredibilitas institusi di mata para pemangku kepentingan. Dalam perspektif teori legitimasi, organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial berisiko kehilangan penerimaan dan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya (Deegan, 2014; Suchman, 1995).

Kesenjangan antara Arah Kebijakan dan Kesiapan Pendidikan Tinggi Akuntansi

Meskipun arah kebijakan nasional dan global telah secara eksplisit menempatkan isu keberlanjutan sebagai prioritas dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasinya di tingkat pendidikan tinggi, khususnya pada program studi akuntansi, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Banyak program studi akuntansi di Indonesia masih mengandalkan pendekatan pembelajaran konvensional yang berfokus pada pelaporan keuangan berbasis entitas, audit, perpajakan, dan manajemen keuangan, tanpa secara substansial mengintegrasikan isu keberlanjutan seperti pelaporan ESG, pengukuran dampak sosial-lingkungan, dan pengelolaan risiko keberlanjutan (Firmansyah et al., 2025).

Firmansyah et al. (2025) menyatakan bahwa sebagian besar kurikulum program studi akuntansi di Indonesia belum secara eksplisit memasukkan akuntansi keberlanjutan sebagai bagian dari capaian pembelajaran utama. Dalam praktiknya, isu keberlanjutan masih sering dibahas secara terbatas, biasanya disisipkan dalam mata kuliah seperti etika bisnis atau pengantar akuntansi manajemen (Oktavianto et al., 2023), tanpa penguatan pada konteks pelaporan ESG yang berbasis standar internasional seperti GRI, IFRS S1, atau IFRS S2. Keterbatasan ini juga diperkuat oleh masih minimnya jumlah dosen yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan topik keberlanjutan secara komprehensif, baik dari segi penguasaan

substansi, pengalaman praktik, maupun kepemilikan sertifikasi profesional seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)* atau *Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA)* (Firmansyah et al., 2025).

Kesenjangan ini juga dikonfirmasi oleh Tarumingkeng (2025) yang menekankan bahwa penyusunan kurikulum akuntansi keberlanjutan di Indonesia belum memiliki landasan sistemik yang kuat. Banyak institusi pendidikan masih berada pada tahap eksperimental dan belum menjadikan ESG sebagai bagian inti dari kompetensi lulusan. Kurangnya sinergi antara regulator pendidikan, asosiasi profesi, dan pelaku industri turut memperlambat proses transformasi kurikulum ke arah yang berorientasi keberlanjutan (Tarumingkeng, 2025).

Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan nyata dunia profesi. Di tengah meningkatnya tuntutan dunia usaha, regulator, dan investor terhadap transparansi atas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, lulusan yang tidak dibekali dengan kompetensi ESG berisiko mengalami keterbatasan dalam pasar kerja dan tidak mampu memenuhi ekspektasi profesional yang terus berkembang. Hal ini tentu berdampak pada persepsi terhadap kualitas institusi pendidikan itu sendiri.

Dalam perspektif teori legitimasi (Suchman, 1995), institusi pendidikan tinggi dipandang sebagai entitas sosial yang memperoleh keberlanjutannya melalui penerimaan dan pengakuan dari lingkungan eksternalnya. Apabila institusi tidak mampu merespons norma dan ekspektasi sosial yang berkembang, dalam hal ini integrasi keberlanjutan dalam pendidikan akuntansi, maka legitimasi institusionalnya berpotensi menurun. Deegan (2014) menekankan bahwa dalam konteks pelaporan, organisasi cenderung melakukan penyesuaian terhadap tekanan lingkungan sosial untuk mempertahankan legitimasinya. Konsep ini juga relevan dalam konteks pendidikan tinggi, di mana kegagalan institusi dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar dan arah kebijakan dapat menyebabkan institusi dipandang tidak relevan dan kurang adaptif terhadap dinamika global.

Oleh karena itu, meskipun arah kebijakan nasional telah cukup progresif dalam mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan, respons pendidikan tinggi akuntansi terhadap kebijakan tersebut masih belum sistemik. Tanpa adanya perbaikan kurikulum yang terarah, peningkatan kapasitas dosen, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia profesional, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan akan terus melebar dan berdampak pada efektivitas kontribusi pendidikan tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta penguatan tata kelola korporasi yang akuntabel.

Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Tantangan Respons Akademik

Dalam perspektif teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), pendidikan tinggi tidak dapat diposisikan sebagai entitas yang terlepas dari kepentingan lingkungan eksternalnya. Menurut Freeman et al. (2021), organisasi harus bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh aktivitasnya, bukan hanya kepada pemilik modal. Dalam konteks pendidikan tinggi akuntansi, pemangku kepentingan meliputi mahasiswa sebagai peserta didik, dunia usaha sebagai pengguna lulusan, regulator sebagai penentu arah kebijakan, serta masyarakat luas yang menaruh ekspektasi terhadap kontribusi profesi akuntansi dalam mewujudkan tata kelola yang bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi akuntansi keberlanjutan ke dalam kurikulum menjadi bagian dari kewajiban institusi pendidikan untuk menjawab kebutuhan pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Egan & Tweedie (2018) dan Wong et al. (2016) menyatakan bahwa terdapat resistensi institusional dalam mengadopsi pendidikan keberlanjutan, terutama disebabkan oleh tidak adanya arahan kurikulum nasional yang eksplisit, keterbatasan kapasitas dosen, dan ketiadaan bahan ajar berbasis konteks lokal. Banyak institusi pendidikan tinggi masih menghadapi tantangan dalam menentukan sejauh mana serta dalam bentuk apa isu keberlanjutan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Akibatnya, pengajaran topik ESG sering kali belum

terencana secara sistematis dan masih bersifat terbatas. Di sisi lain, sebagian dosen akuntansi belum memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang akuntansi keberlanjutan, dan beberapa di antaranya masih memandang isu ESG sebagai tema yang bersifat non-teknis dan belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari inti keilmuan akuntansi (Egan & Tweedie, 2018; Melancon, 2017).

Firmansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa tanpa pelatihan yang sistematis dan dukungan kelembagaan, integrasi ESG dalam kurikulum hanya akan bersifat simbolik, misalnya dengan menyisipkan satu atau dua sesi tentang keberlanjutan dalam mata kuliah yang sudah ada, tanpa adanya perubahan substansial dalam capaian pembelajaran atau metode evaluasi. Situasi ini berpotensi menciptakan lulusan yang tidak siap menjawab tantangan nyata dalam praktik profesional, terutama dalam menghadapi tuntutan akan transparansi, pelaporan ESG, dan pengambilan keputusan berbasis risiko keberlanjutan. Akibatnya, institusi pendidikan tinggi dapat kehilangan relevansi sosialnya sebagai agen pencetak sumber daya manusia strategis bagi pembangunan berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi reformasi struktural dalam pendidikan tinggi akuntansi. Untuk merespons ekspektasi pemangku kepentingan secara tepat, integrasi ESG harus dirancang sebagai bagian dari sistem pembelajaran yang utuh, mulai dari desain kurikulum, penguatan kompetensi dosen, penyusunan modul pembelajaran, hingga evaluasi berbasis proyek ESG dan studi kasus riil dari dunia usaha. Tanpa respons yang holistik, pendidikan tinggi berisiko terjebak dalam compliance mindset yang tidak menghasilkan transformasi substantif. Sebaliknya, jika dikelola secara strategis, pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui integrasi keberlanjutan dapat memperkuat posisi akademik institusi, meningkatkan legitimasi sosial, dan menjembatani dunia pendidikan dengan realitas pasar tenaga kerja dan tuntutan regulatif.

Pembelajaran dari Praktik Internasional

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan tinggi dapat berhasil apabila didukung oleh pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Gebreiter (2022) menyoroti pentingnya pendekatan practice-oriented pedagogy, di mana pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berbasis pengalaman nyata melalui proyek kolaboratif dan keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit. Di Inggris, misalnya, sejumlah universitas telah mengembangkan modul pelaporan keberlanjutan berbasis proyek yang menggandeng mitra industri dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan ESG dalam dunia nyata.

Temuan serupa disampaikan oleh Unda et al. (2020) dalam konteks pendidikan akuntansi di Australia dan Selandia Baru. Studi tersebut menyoroti bahwa keberhasilan integrasi isu keberlanjutan dalam kurikulum akuntansi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan badan regulator. Kolaborasi ini dinilai penting untuk merancang kurikulum dan materi ajar yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga responsif terhadap dinamika dunia profesional. Selain itu, pelatihan dosen secara berkelanjutan juga menjadi faktor kunci agar pengajaran isu keberlanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang kontekstual, terkini, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendekatan semacam ini memungkinkan institusi pendidikan tinggi menjaga relevansi pembelajaran serta memperkuat posisi mereka dalam menjawab tuntutan akuntabilitas keberlanjutan secara global.

Melancon (2017), melalui analisis terhadap perubahan dalam pendidikan akuntansi di Amerika Serikat, juga menegaskan bahwa integrasi ESG dalam pendidikan akuntansi perlu didukung oleh system-level leadership dari asosiasi profesi dan lembaga akreditasi. Di AS,

AICPA dan AACSB berperan aktif dalam mengadvokasi pentingnya topik keberlanjutan, menyusun standar pendidikan yang mencakup ESG, serta mendorong evaluasi program studi berdasarkan kontribusinya terhadap agenda keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa suksesnya integrasi ESG bukan hanya soal konten pengajaran, melainkan juga tentang reformasi sistem dan kepemimpinan institusional.

Pengalaman dari negara-negara Asia juga memberikan pembelajaran penting. Di Malaysia, Jamil (2018) menunjukkan bahwa tekanan akreditasi dan dorongan dari asosiasi profesi menjadi faktor pendorong utama dalam mengintegrasikan topik keberlanjutan ke dalam kurikulum akuntansi. Di Jepang, Kawahara et al. (2024) menemukan bahwa universitas mulai menerapkan kurikulum ESG melalui pelatihan lintas disiplin dan kerja sama industri, meskipun masih menghadapi tantangan dalam standarisasi capaian pembelajaran. Chiang & Chen (2022) mengkaji bagaimana pendidik di Tiongkok memahami dan menerapkan prinsip *education for sustainable development* (ESD), serta menyoroti perlunya dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong pemahaman keberlanjutan sejak pendidikan dasar. Pimpa (2023) menyatakan bahwa di Thailand, upaya integrasi ESG ke dalam kurikulum pendidikan tinggi masih menghadapi hambatan struktural, termasuk resistensi kelembagaan dan keterbatasan pemahaman praktis di kalangan dosen.

Sementara itu di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al. (2024) bahwa sebagian besar program studi akuntansi di Indonesia belum memiliki kemitraan formal dengan pelaku industri di bidang ESG, baik dalam bentuk pengembangan kurikulum, magang, maupun studi kasus pembelajaran. Ketiadaan kerja sama ini menyebabkan pengajaran ESG bersifat teoritis dan tidak kontekstual. Selain itu, ketersediaan bahan ajar yang berbasis pada konteks lokal Indonesia masih sangat terbatas, sehingga proses pembelajaran tidak mampu memberikan pemahaman aplikatif tentang tantangan keberlanjutan di lingkungan domestik. Akibatnya, integrasi topik ESG dalam kurikulum cenderung bersifat sporadis, tidak sistematis, dan bergantung pada inisiatif individual dosen.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa penguatan pendidikan akuntansi berbasis keberlanjutan di Indonesia perlu belajar dari praktik internasional. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor, mengembangkan bahan ajar berbasis lokal, meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan dan sertifikasi ESG, serta menghadirkan kepemimpinan kolektif dari asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan lembaga akreditasi nasional. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga ini dalam merumuskan standar kompetensi dan kurikulum berbasis ESG menjadi kunci dalam membangun pendidikan tinggi akuntansi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing di era keberlanjutan global.

Perbandingan Kurikulum Akuntansi Berbasis ESG: Praktik Indonesia dan Internasional

Integrasi topik keberlanjutan dalam pendidikan akuntansi telah berkembang secara signifikan di berbagai negara, terutama di kawasan yang menjadikan isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*) sebagai bagian strategis dari tata kelola pendidikan tinggi. Di Inggris, universitas-universitas telah mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan ke dalam kurikulum inti program studi akuntansi sejak 2019. Modul-modul ini umumnya dirancang berbasis proyek dan dikaitkan langsung dengan standar akreditasi internasional seperti AACSB, dengan melibatkan pelaku industri sebagai mitra pembelajaran (Gebreiter, 2022). Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep ESG secara teoritis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis melalui keterlibatan dalam studi kasus dan kegiatan pelaporan keberlanjutan berbasis data aktual.

Di Jepang, Kawahara et al. (2024) menemukan bahwa universitas mulai membangun kurikulum ESG melalui program lintas disiplin yang memadukan prinsip keberlanjutan dengan praktik profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Inisiatif ini umumnya didukung oleh

kebijakan institusi dan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pelaku usaha dan organisasi masyarakat sipil. Kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat memahami ESG sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, serta dilatih untuk menilai risiko dan dampak sosial-lingkungan dalam proses pelaporan.

Pengalaman serupa ditemukan di Malaysia, di mana Jamil (2018) menegaskan bahwa lembaga akreditasi seperti Malaysian Qualifications Agency (MQA) dan asosiasi profesi seperti Malaysian Institute of Accountants (MIA) telah mendorong integrasi keberlanjutan dalam pendidikan tinggi akuntansi. ESG tidak hanya diajarkan sebagai bagian dari etika bisnis, tetapi telah menjadi komponen eksplisit dalam capaian pembelajaran lulusan, dengan orientasi pada akuntabilitas sosial dan tata kelola berkelanjutan. Di Tiongkok, Chiang & Chen (2022) menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan yang konsisten dalam memperkuat pemahaman keberlanjutan sejak pendidikan dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengajar, kurikulum nasional, dan pendekatan pedagogis memainkan peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan sejak usia dini, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan profesional yang berorientasi ESG di tingkat lanjutan..

Sebaliknya, di Indonesia, integrasi ESG dalam kurikulum akuntansi masih bersifat fragmentaris dan belum menjadi komponen sistemik dalam standar nasional pendidikan tinggi. Firmansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar program studi akuntansi belum memasukkan akuntansi keberlanjutan sebagai capaian pembelajaran utama. Topik ESG umumnya hanya disisipkan secara terbatas dalam mata kuliah seperti etika bisnis atau pengantar manajemen, tanpa penguatan struktur pembelajaran atau pengembangan kompetensi teknis keberlanjutan. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh masih terbatasnya kapasitas dosen serta kurang optimalnya kemitraan antara institusi pendidikan dan sektor industri dalam perancangan maupun implementasi kurikulum berbasis keberlanjutan (Agustina et al., 2024).

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara arah kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kesiapan pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia. Sementara negara-negara seperti Inggris, Jepang, dan Malaysia telah menetapkan ESG sebagai elemen penting dalam pembelajaran inti dan akreditasi profesi, Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan kurikulum keberlanjutan. Hal ini menimbulkan risiko ketertinggalan kompetensi lulusan dalam menjawab tuntutan global akan transparansi, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang etis.

Peran Strategis Organisasi Profesi Akuntansi dalam Reformasi Kurikulum

Transformasi kurikulum pendidikan tinggi akuntansi menuju pengarusutamaan isu keberlanjutan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada institusi perguruan tinggi secara individu. Peran organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan khususnya Kompartemen Akuntansi Pendidikan (IAI KAPd) sangat krusial dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tuntutan global dan perkembangan regulasi nasional. Sebagai otoritas moral dan teknis dalam pengembangan profesi akuntansi di Indonesia, IAI dan KAPd memiliki legitimasi untuk menetapkan arah dan kerangka standar kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan regulator.

Menurut Prakosa & Firmansyah (2022), asosiasi profesi akuntansi harus menjadi pelopor dalam mendesain kurikulum pendidikan akuntansi yang memasukkan aspek ESG secara sistematis, terstruktur, dan berbasis praktik global. Hal ini sejalan dengan pendekatan professional-led curriculum reform yang banyak diterapkan di negara maju, di mana asosiasi profesi bekerja sama dengan dunia akademik untuk memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan mencerminkan kebutuhan dunia kerja kontemporer. Tanpa intervensi dan kepemimpinan strategis dari IAI, upaya transformasi kurikulum di tingkat institusi cenderung bersifat parsial, tidak konsisten, dan sulit mencapai skala nasional.

Untuk menjembatani kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dan implementasi aktual di level pendidikan, IAI dan KAPd dapat mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) nasional yang mengintegrasikan kompetensi ESG, baik dari sisi pengetahuan konseptual, keterampilan praktis, hingga sikap profesional. CPL ini dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan kurikulum oleh seluruh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akuntansi. Kedua, mendorong peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan dan sertifikasi profesional seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)* dan *Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA)*. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas pengajaran, tetapi juga menjamin kualitas penyampaian materi keberlanjutan sesuai standar internasional.

Ketiga, IAI dapat mengembangkan modul pembelajaran kolaboratif yang melibatkan akademisi dan praktisi ESG untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Modul ini dapat mencakup studi kasus, proyek berbasis masalah (*problem-based learning*), hingga simulasi penyusunan laporan keberlanjutan. Keempat, memperluas kemitraan strategis dengan sektor bisnis, khususnya perusahaan yang telah menerapkan pelaporan ESG secara komprehensif. Kolaborasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan tempat magang, studi lapangan, atau pengajaran tamu yang memperkaya perspektif mahasiswa tentang praktik pelaporan keberlanjutan di dunia nyata.

Peran aktif IAI dan KAPd dalam memimpin reformasi kurikulum juga akan memperkuat posisi mereka sebagai *knowledge authority* dalam tata kelola keberlanjutan di Indonesia. Lebih dari sekadar penjaga standar teknis, asosiasi profesi harus menjadi agen perubahan yang memfasilitasi integrasi keberlanjutan dalam seluruh rantai nilai profesi akuntansi, mulai dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga praktik profesional. Dengan cara ini, pendidikan akuntansi di Indonesia dapat lebih siap menghadapi era ESG dan memainkan peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional maupun global.

Urgensi Transformasi Sistemik Pendidikan Akuntansi

Temuan-temuan dalam penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa transformasi pendidikan akuntansi menuju pengarusutamaan keberlanjutan tidak dapat dilakukan secara parsial atau simbolik. Diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup reformasi menyeluruh pada berbagai komponen pendidikan, mulai dari penyusunan kurikulum berbasis ESG, peningkatan kapasitas dan kompetensi dosen, penyesuaian metode pembelajaran, hingga penguatan jejaring kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha. Pendekatan ini harus berlandaskan pada pemahaman bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya merupakan disiplin teknis baru, tetapi juga sebuah paradigma baru dalam akuntansi yang menuntut keterbukaan, partisipasi pemangku kepentingan, dan akuntabilitas sosial (Deegan, 2014; Freeman et al., 2021).

Tanpa perubahan struktural dan terkoordinasi, program studi akuntansi di Indonesia akan berisiko tertinggal dalam menjawab kebutuhan global yang semakin menempatkan isu keberlanjutan sebagai indikator utama kompetensi profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh (Firmansyah et al., 2025), lulusan akuntansi yang tidak memiliki literasi ESG akan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan praktik pelaporan modern, baik di sektor privat maupun publik. Hal ini dapat berdampak pada penurunan daya saing lulusan, serta menghambat kontribusi profesi akuntansi dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan transisi ekonomi hijau nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045 (Undang-Undang RI, 2024).

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam pendidikan tinggi juga memiliki dimensi legitimasi kelembagaan. Dalam kerangka teori legitimasi (Deegan, 2014; Suchman, 1995), institusi pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika nilai dan ekspektasi sosial yang terus berkembang. Ketika masyarakat, regulator, dan industri menuntut akuntan

yang mampu mengidentifikasi risiko ESG, mengukur dampak lingkungan dan sosial, serta menyajikan informasi keberlanjutan secara akuntabel, institusi pendidikan yang gagal mengakomodasi kebutuhan ini akan dipandang tidak relevan. Sebaliknya, institusi yang mampu mengintegrasikan ESG secara komprehensif ke dalam sistem pembelajaran akan memperkuat legitimasi sosialnya sebagai pencetak sumber daya manusia unggul.

Selanjutnya, transformasi sistemik ini juga akan memperluas kontribusi akademik terhadap penguatan tata kelola organisasi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pengajaran akuntansi keberlanjutan, institusi pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang berdaya saing, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan praktik bisnis yang beretika. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat ekosistem keberlanjutan nasional yang berbasis pada kapasitas manusia dan institusi yang sadar tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi akuntansi keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak, seiring dengan perkembangan regulasi global seperti IFRS S1 dan S2, serta kebijakan nasional seperti POJK No. 51 Tahun 2017 dan RPJPN 2025–2045. Namun, implementasi pada tingkat institusi pendidikan masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk dominasi kurikulum konvensional, keterbatasan kapasitas dosen, serta minimnya sinergi antara dunia akademik dan industri.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa tekanan legitimasi dari pemangku kepentingan, serta tuntutan terhadap lulusan yang kompeten dalam pelaporan keberlanjutan, menuntut adanya transformasi sistemik dalam pendidikan akuntansi. Reformasi ini tidak dapat bersifat parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif organisasi profesi, khususnya IAI dan IAI KAPd, dalam merumuskan kebijakan kurikulum, penguatan kompetensi pengajar, dan penyusunan standar pembelajaran nasional berbasis keberlanjutan. Dengan demikian, integrasi akuntansi keberlanjutan tidak hanya merespons tuntutan regulatif dan profesional, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi pendidikan serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber literatur yang digunakan, karena hanya mengandalkan studi akademik, kebijakan nasional, dan dokumen standar internasional dalam rentang 2016–2024. Pendekatan *scoping review* yang bersifat eksploratif juga belum memungkinkan untuk mengukur efektivitas integrasi ESG dalam kurikulum secara kuantitatif. Selain itu, belum dilibatkan data primer dari wawancara atau observasi langsung ke perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan studi literatur dengan survei terhadap dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan industri untuk memetakan persepsi, kesiapan, dan hambatan integrasi ESG dalam pendidikan akuntansi secara lebih empiris. Selain itu, studi komparatif antar negara atau antar institusi juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan kurikulum akuntansi keberlanjutan di tingkat global maupun regional.

Dalam konteks transformasi pendidikan akuntansi yang sejalan dengan agenda keberlanjutan global, IAI dan IAI KAPd diharapkan mengambil peran kepemimpinan yang lebih aktif dan strategis. Salah satu langkah prioritas adalah merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) nasional yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi kompetensi ESG. CPL ini akan menjadi acuan normatif yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh program studi akuntansi di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kapasitas dosen perlu didorong melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesional yang terstruktur, seperti *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS) dan *Certified Sustainability Reporting Assurer* (CSRA). Hal ini penting untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki pengetahuan substantif dan keterampilan teknis dalam pelaporan keberlanjutan.

Lebih lanjut, pengembangan modul ajar kolaboratif antara akademisi dan praktisi, serta penguatan kerja sama dengan dunia industri, merupakan strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Kerja sama ini juga membuka peluang penerapan pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus ESG yang kontekstual dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui upaya tersebut, IAI dan IAI KAPd tidak hanya akan meningkatkan kualitas lulusan akuntansi, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi akuntan sebagai garda depan dalam mendorong tata kelola organisasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Rahmanu, I., Saputri, H., & Tahang, M. (2024). The strategic role of environmental accounting in promoting business sustainability in Indonesia. *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan*, 2(3), 10–22. <https://doi.org/10.59639/asik.v2i3.71>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Badruzzuhad, M. T., Fadhillah, R. A., & Firmansyah, A. (2023). Perkembangan kebijakan keberlanjutan di dunia: pendekatan scoping review. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 207–219. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.551>
- Chiang, M., & Chen, P. (2022). Education for sustainable development in the business programme to develop international Chinese college students' sustainability in Thailand. *Journal of Cleaner Production*, 374, 134045. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134045>
- Deegan, C. (2014). *Financial accounting theory*. McGraw-Hill Education (Australia) Pty Ltd.
- Doloksaribu, R. P., & Firmansyah, A. (2024). Peluang penerapan kebijakan mandatory sustainability disclosure di Indonesia berbasiskan IFRS S2. *Akuntansiku*, 3(1), 38–54. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.670>
- Egan, M., & Tweedie, D. (2018). A “green” accountant is difficult to find. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(6), 1749–1773. <https://doi.org/10.1108/aaaj-03-2017-2891>
- Firmansyah, A., Sururi, S., Mahmudah, N., Dewata, E., & Wibowo, P. (2025). Edukasi pelaporan keberlanjutan bagi pendidikan vokasi: Mempersiapkan akuntan masa depan yang berdaya saing. *Pengmasku*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v5i1.1419>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: a stakeholder approach*. Boston : Pitman.
- Freeman, R. E., Dmytryiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Gebreiter, F. (2022). A profession in peril? University corporatization, performance measurement and the sustainability of accounting academia. *Critical Perspectives on Accounting*, 87, 102292. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102292>
- Global Report Initiative. (2024). *Standar Terkonsolidasi: GRI Standards*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>
- Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and

- regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 Sustainability Disclosure Standard: Climate-related Disclosure*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s2-climate-related-disclosures/>
- Jamil, N. N. (2018). The role of sustainability and innovation in constructing accounting education and future accountants. *Business & Management*, 1(June), 36–49. <https://myjournal.mohe.gov.my/public/article-view.php?id=178749>
- Kawahara, N., Irie, N., & Fitriyani, D. (2024). *Challenges in sustainability-related education for professional accountants*. <https://kindai.repo.nii.ac.jp/record/2001669/files/AN10437975-20240731-0001.pdf>
- Lhutfi, I., & Mardiani, R. (2020). Merdeka Belajar - Kampus merdeka policy: How does it affect the sustainability on accounting education in Indonesia? *Dinamika Pendidikan*, 15(2), 243–253. <https://doi.org/10.15294/dp.v15i2.26071>
- Melancon, B. C. (2017). The accounting profession and sustainability. In *The CPA Journal: Vol. July*. <https://www.cpajournal.com/2017/07/18/accounting-profession-sustainability/>
- Oktavianto, R., Noorma, M., Siregar, N., & Wijayanti, Y. (2023). Tren riset keberlanjutan dalam pendidikan akuntansi: Suatu kajian bibliometrik. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 52–63. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.18200>
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- Peraturan OJK. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik*.
- Peraturan Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Permendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265158/permendikbudriset-no-53-tahun-2023>
- Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & Mcewen, S. A. (2014). A scoping review of scoping reviews: Advancing the approach and enhancing the consistency. *Research Synthesis Methods*, 5(4), 371–385. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1123>
- Pimpa, N. (2023). Sustainability training in business education in Thailand. *Cogent Education*, 10(2), 1–20. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245627>
- Prakosa, D. K., & Firmansyah, A. (2022). Apakah revolusi industri 5.0 dapat menghilangkan profesi akuntan? *Jurnalku*, 2(3), 316–340. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.282>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Tarumingkeng, R. C. (2025). *Akuntansi berbasis ESG: Pilar untuk pembangunan Indonesia*. Rudycyct e-Press. [https://rudycyct.com/ab/Akuntansi Berbasis.ESG%28Environmental%2CSocial%2CGovernance%29Pilar.utk.Pembanguna.n.Ekonomi.Indonesia.pdf?utm_source=chatgpt.com](https://rudycyct.com/ab/Akuntansi%20Berbasis.ESG%28Environmental%2CSocial%2CGovernance%29Pilar.utk.Pembanguna.n.Ekonomi.Indonesia.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Unda, L. A., Khosa, A., Burch, S., & Wilkin, C. (2020). Sustainability of the accounting and

- finance academic profession: students' and supervisors' views about the PhD supervision process. *Accounting and Finance*, 60(3), 3103–3132. <https://doi.org/10.1111/acfi.12376>
- Undang-Undang RI. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- Wong, J., Wong, N., Li, W. Y., & Chen, L. (2016). Sustainability assurance: an emerging market for the accounting profession. *Pacific Accounting Review*, 28(3), 238–259. <https://doi.org/10.1108/PAR-11-2014-0038>
- Yan, Y. (2024). *The development of sustainability accounting globally* [University of Windsor]. <https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/294/>